
ARTICLE

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipatif di Kota Metro

Pindo Riski Saputra

¹Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Dharma Wacana Metro, Indonesia.

How to cite: Saputra, Pindo Riski. (2025) Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipatif di Kota Metro. *Administrativa* 7 (2)

Article History

Received: 8 Januari 2025
Accepted: 7 Mei 2025

Keywords:

Community empowerment, environmental management, participatory, Metro City, waste bank, STBM

Kata Kunci:

Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, partisipatif, Kota Metro, bank sampah, STBM

ABSTRACT

Participatory-based community empowerment is increasingly recognized as an effective approach to sustainable environmental management. This study explores empowerment strategies in Metro City, Lampung, by integrating an analysis of factual environmental conditions such as daily waste generation, irrigation pollution, and the shortage of green open spaces. A descriptive qualitative method was employed through literature review, analysis of local government documents, media reports, and academic research. The findings indicate that effective empowerment strategies involve strengthening local capacities, active community participation in waste bank management, adherence to the STBM (Community-Based Total Sanitation) framework, and multi-stakeholder collaboration. The main obstacles include limited funding, weak inter-agency coordination, and low public awareness. The study recommends enhancing policy support, providing incentives, and establishing inclusive mechanisms for participatory-based sustainable development.

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif semakin diakui sebagai pendekatan efektif dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Studi ini mengeksplorasi strategi pemberdayaan di Kota Metro, Lampung, dengan mengintegrasikan analisis kondisi faktual lingkungan seperti produksi sampah harian, pencemaran irigasi, dan kekurangan ruang hijau. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui telaah literatur, dokumen pemerintah daerah, serta laporan media dan riset akademis. Hasil menunjukkan strategi pemberdayaan yang efektif melibatkan kapasitas lokal, partisipasi aktif di pengelolaan bank sampah, keterlibatan pedoman STBM, serta kolaborasi multi-stakeholder. Kendala utama mencakup keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Rekomendasi menekankan penguatan kebijakan, insentif, serta mekanisme inklusif dalam pembangunan berkelanjutan berbasis partisipatif.

* Corresponding Author

Email : pindoriskisaputra@dharmawacana.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menuntut sinergi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Di tengah dinamika pembangunan daerah, isu lingkungan perkotaan menjadi tantangan yang semakin mendesak, terutama dalam hal pengelolaan sampah, sanitasi, dan degradasi kualitas ruang terbuka hijau. Kota Metro di Provinsi Lampung tidak luput dari persoalan tersebut. Sebagai kota berkembang dengan predikat sebagai kota pendidikan, Metro menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2023, populasi Kota Metro mencapai sekitar 178.000 jiwa (Maulidya, 2025, dalam *AJSH Journal*). Dengan jumlah tersebut, produksi sampah harian mencapai $\pm 102,7$ ton, dan sekitar 80 ton per hari di antaranya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karang Rejo, yang saat ini belum menggunakan sistem sanitary landfill. Hal ini menimbulkan risiko serius seperti pencemaran air tanah, potensi longsor, dan kebakaran, terutama di musim kemarau (Antara News Lampung, 2024; Pemerintah Kota Metro, 2024).

Tidak hanya itu, permasalahan lain yang menonjol adalah penumpukan sampah pada saluran irigasi utama di wilayah Metro Pusat, seperti di Jl. AH Nasution dan kawasan Irigasi Karangrejo. Saluran ini tidak hanya dipenuhi oleh sampah plastik dan domestik, tetapi juga mengalami sedimentasi parah yang menyebabkan tersumbatnya aliran air dan berpotensi menimbulkan banjir lokal saat curah hujan tinggi (Lampungnewspaper.disway.id, 2023; Radar Lampung, 2024).

Sementara itu, kondisi sanitasi lingkungan juga masih belum optimal. Studi dari UIN Raden Intan Lampung (2021) menyebutkan bahwa sebagian warga masih membuang limbah domestik langsung ke saluran air tanpa pengolahan, dan belum semua kawasan menerapkan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), terutama terkait pengelolaan sampah dan limbah cair. Di sisi lain, hasil kajian perilaku lingkungan masyarakat perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya persepsi kontrol perilaku dan norma sosial menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Amir et al., 2024).

Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan lingkungan di Kota Metro bukan hanya soal teknis, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, perilaku, dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan struktural dan teknokratis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks inilah, pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif menjadi strategi yang sangat relevan. Strategi ini mendorong keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengelolaan lingkungan. Berbagai inisiatif seperti bank sampah, program Jumat Bersih, STBM, serta kelompok swadaya

lingkungan telah mulai tumbuh di beberapa kelurahan di Kota Metro, namun belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.

B. TINJAU PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Chambers (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok memperoleh kontrol atas sumber daya dan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan lingkungan, pemberdayaan tidak hanya mencakup transfer informasi, tetapi juga pembagian kekuasaan, kapasitas, dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.

Teori partisipasi masyarakat yang paling banyak dirujuk adalah model “Ladder of Participation” yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Ia mengkategorikan partisipasi dalam delapan tingkatan, mulai dari manipulasi dan terapi (partisipasi semu), konsultasi dan penginformasian (partisipasi simbolik), hingga kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga (partisipasi penuh). Model ini menekankan bahwa partisipasi yang bermakna menuntut adanya pengaruh nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Plummer (2000) memperluas pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa partisipasi harus dilakukan secara komprehensif dalam setiap tahapan pembangunan—mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan. Penelitian-penelitian lokal pun menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif dari komunitas yang terlibat (repository.ipb.ac.id, 2023).

STBM dan Perilaku Lingkungan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan nasional dalam peningkatan sanitasi yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai komponen utama. STBM memiliki lima pilar, salah satunya adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair yang aman dan ramah lingkungan. Pilar kelima ini relevan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan skala lokal (repository.radenintan.ac.id, 2022; Pemerintah Kota Metro, 2024).

Dalam implementasinya, STBM menggunakan pendekatan “pemicu perilaku” (behavioral triggering), di mana masyarakat difasilitasi untuk menyadari bahaya praktik buruk dan memotivasi mereka melakukan perubahan. Ini sejalan dengan teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), di mana perceived behavioral control (PBC) menjadi salah satu prediktor utama perubahan perilaku lingkungan. Studi tentang perilaku rumah tangga perkotaan di Indonesia (arxiv.org, 2024) menunjukkan bahwa individu yang memiliki persepsi tinggi terhadap kemampuannya mengelola sampah lebih cenderung menerapkan gaya hidup zero waste dan aktif dalam kegiatan komunitas lingkungan.

Dengan demikian, STBM bukan hanya sekadar program sanitasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang lebih luas, termasuk dalam penguatan bank sampah, program daur ulang, serta kegiatan kebersihan berbasis RT/RW.

Studi Kota Metro Berkelanjutan

Kota Metro telah menunjukkan berbagai inisiatif menuju pembangunan kota berkelanjutan, seperti penyusunan rencana ruang terbuka hijau, zonasi lahan pertanian, dan pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan bersih lingkungan. Namun, menurut Maulidya (2025), tantangan besar masih terletak pada aspek partisipasi masyarakat dan konsistensi kebijakan lingkungan, terutama dalam konteks penerapan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat lokal.

Sumber-sumber lain menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen formal dari pemerintah daerah, seperti dalam dokumen RPJMD dan Peraturan Wali Kota, pelaksanaan program lingkungan sering kali mengalami kendala pada aspek sosialisasi, koordinasi lintas OPD, serta rendahnya integrasi dengan inisiatif masyarakat (Pemerintah Kota Metro, 2024; jurnal.ardenjaya.com, 2025; Antara News Lampung, 2023).

Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan struktur partisipatif menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Pengelolaan lingkungan tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan pendekatan top-down, tanpa keterlibatan komunitas lokal sebagai penggerak utama perubahan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan daerah Kota Metro, laporan kinerja pemerintah daerah, program pemberdayaan berbasis lingkungan, serta dokumen-dokumen dari organisasi lingkungan masyarakat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Metro. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik berdasarkan tahapan pemberdayaan dan bentuk partisipasi masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potret Umum Permasalahan Lingkungan di Kota Metro

Kota Metro menghadapi sejumlah persoalan lingkungan yang bersifat struktural dan kultural. **Pertama**, peningkatan volume sampah rumah tangga yang mencapai $\pm 102,7$ ton per hari pada tahun 2023 merupakan cerminan dari pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sekitar 80 ton per hari diangkut ke TPAS Karang Rejo, yang belum memenuhi standar teknis, rawan longsor, dan berpotensi mencemari air tanah. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengolahan akhir serta belum optimalnya pemilahan di sumber.

Kedua, minimnya fasilitas daur ulang dan pemilahan membuat sampah anorganik bercampur dengan sampah organik, sehingga menurunkan potensi nilai ekonomi limbah. Di beberapa kelurahan, TPS belum menyediakan fasilitas pemilahan tiga jenis sampah (organik, anorganik, residu).

Ketiga, masalah kesadaran masyarakat masih menjadi isu sentral. Banyak warga belum menjadikan kebersihan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Fenomena membuang sampah sembarangan, membakar sampah di pekarangan, dan minimnya partisipasi dalam kegiatan kebersihan bersama mencerminkan lemahnya kesadaran kolektif.

Keempat, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), terutama di kawasan padat penduduk, menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem mikro wilayah. Peraturan daerah mengenai RTH belum sepenuhnya diterapkan, terutama di kawasan permukiman dengan luas tanah terbatas. Padahal, RTH penting sebagai penyerap karbon, pengendali banjir, dan ruang sosial masyarakat.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Metro

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Metro telah mengembangkan pendekatan pemberdayaan berbasis partisipatif, yang meliputi:

a. Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan

Upaya edukatif melalui program “Sekolah Adiwiyata”, pelatihan kader lingkungan, serta kampanye di media sosial merupakan bentuk pemberdayaan kognitif. Strategi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dari usia dini hingga dewasa. Namun, pendekatan ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistemik ke dalam kurikulum sekolah atau kegiatan RT/RW.

b. Pembentukan Lembaga Berbasis Komunitas

Bank Sampah, Pokdarling, dan Karang Taruna menjadi ujung tombak pelaksana program. Keberhasilan Bank Sampah Hatim Berseri dalam mengelola sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai ekonomi menunjukkan bahwa komunitas mampu menjalankan inisiatif secara mandiri, jika diberi dukungan teknis dan insentif yang tepat.

c. Kemitraan Pemerintah-Masyarakat

Kemitraan ini dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menggandeng LSM dan sektor swasta dalam berbagai program. Kolaborasi ini memperkuat konsep network governance, di mana sektor publik tidak bekerja sendiri, tetapi membangun sinergi lintas aktor untuk menciptakan hasil yang lebih efektif.

d. Penguatan Kapasitas Teknis dan Sosial

Pelatihan pembuatan kompos, pelatihan manajemen organisasi lingkungan, serta kegiatan gotong royong bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis warga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Namun, kegiatan ini masih tergantung pada intervensi pemerintah dan belum bersifat berkelanjutan secara swadaya.

Analisis Partisipasi Berbasis Teori Plummer

Jika dianalisis menggunakan model partisipasi Plummer (2000), maka spektrum partisipasi di Kota Metro masih beragam dan menunjukkan tahapan sebagai berikut:

- **Partisipasi Pasif:** Mayoritas masyarakat hanya menjadi penerima informasi dari pemerintah atau media sosial tanpa keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun evaluasi.
- **Partisipasi Konsultatif:** Masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi dan pelatihan, namun belum memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan strategis program.
- **Partisipasi Interaktif:** Terjadi dalam kegiatan operasional seperti pengelolaan bank sampah, urban farming, atau gotong royong. Masyarakat ikut merancang dan melaksanakan kegiatan secara langsung.
- **Partisipasi Otonom:** Mulai muncul di beberapa komunitas seperti Karang Taruna Hijau atau kampung iklim, namun masih terbatas jumlah dan skalanya. Dukungan kebijakan dan insentif diperlukan untuk memperluas partisipasi jenis ini.

4.4. Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga tantangan utama yang menghambat efektivitas pemberdayaan masyarakat:

a. Motivasi dan Kesadaran yang Rendah

Banyak warga belum melihat manfaat langsung dari keterlibatan dalam program lingkungan. Ini disebabkan kurangnya insentif, budaya individualistik, serta masih kuatnya ketergantungan pada pemerintah dalam urusan kebersihan.

b. Terbatasnya Anggaran

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, penyediaan alat daur ulang, dan pengelolaan bank sampah membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Keterbatasan APBD Kota Metro menyebabkan banyak program tidak berkelanjutan.

c. Koordinasi Lintas Lembaga yang Lemah

Program lingkungan seringkali tumpang tindih atau berjalan sendiri-sendiri antar-OPD dan komunitas. Belum adanya sistem koordinasi dan monitoring terpadu menyebabkan ketidakefisienan sumber daya dan rendahnya capaian program.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kota Metro telah menunjukkan progres positif, terutama melalui pendekatan komunitas dan partisipatif. Keberadaan lembaga berbasis masyarakat seperti bank sampah menjadi contoh konkret praktik

pengelolaan lingkungan partisipatif. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal dukungan kebijakan, anggaran, dan peningkatan kesadaran kolektif.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu memperluas pelatihan dan pendampingan teknis untuk komunitas lingkungan.
2. Dibutuhkan regulasi yang mendukung insentif bagi partisipasi masyarakat.
3. Harus ada platform komunikasi dan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan dan kegiatan lingkungan.

REFERENCES

- Arnstein, S.R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?*. IDS Discussion Paper.
- Plummer, J. (2000). *Focusing Partnerships: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-Private Partnerships*. Earthscan.
- Maulidya, A. (2025). "Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Kota Metro, Lampung)". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1):850–861 jurnal.ardenjaya.com
- Gilang, R.A.Y. (2021). *Implementasi Program STBM di Kota Metro*. UIN Raden Intan Lampung repository.radenintan.ac.id
- Dinas LH Kota Metro. "DLH Kota Metro Optimalkan Bank Sampah..." Antaranews, 28 Juni 2024 Lampost
- ANTARA Lampung. "Wujudkan kota bersih, Pemkot Metrogerakkan bank sampah..." 2024 Antara News Lampung
- Lampung Newspaper / Disway. Berita "Kondisi Irigasi Primer..." 23 Okt 2024 lampungnewspaper.disway.id+1
- Lampung Newspaper / Disway. "Sampah Menumpuk 'Hias' Irigasi..." 21 Sep 2023 lampungnewspaper.disway.id
- Disway / radarlampung. "Tumpukan Sampah di Saluran Irigasi..." 24 Okt 2024 Radar Lampung
- Lampung Newspaper isu strategis permasalahan lingkungan Lampung anakotah.blogspot.com

- Universitas Lampung. “Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung” (Wacana Publik) wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id
- RISE / Wolff et al. (2021). “Citizen Science Flood Monitoring in Urban Informal Settlements” arxiv.org
- Amir et al. (2025). “Urban Household Behavior in Indonesia: Drivers of Zero Waste Participation” arxiv.org
- Ahmed et al. (2017). “A Participatory Sensing Framework for Environment Pollution Monitoring...”